

RENCANA KERJA  
(RENJA) TAHUN 2024



KANTOR CAMAT BENGALON  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
2024

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas segala limpahan rahmat taufik dan Inayah-Nya, alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bengalon Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai program kerja Kecamatan Bengalon dalam kurun waktu tahun 2024. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RENJA ini dibuat untuk dijadikan landasan berpijak bagi peningkatan pembangunan Kecamatan Bengalon dengan menggunakan pola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). RENJA memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Aspek Strategis Organisasi dan Penetapan Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci. Namun terlepas dari itu semua, penetapan rencana kerja dapat mempermudah staf dan perangkat Kantor Camat Bengalon dalam merencanakan rencana anggaran dan kegiatan sekaligus untuk mengukur tingkat keberhasilan dan ketercapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bengalon Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bengalon tahun 2023 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Bengalon, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bengalon tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Bengalon tahun 2016-2021.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja tahun 2024 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA ini terdapat kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan serta penyempurnaan pada RENJA di masa yang akan datang.

Bengalon, 2024  
Camat,  
  
**Drs. SUHARMAN**  
NIP. 19850904 200312 2 001

DAFTAR ISI

|                                                                                                  | <i>Halaman</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| KATA PENGANTAR                                                                                   | i              |
| DAFTAR ISI                                                                                       | ii             |
| DAFTAR TABEL                                                                                     | iii            |
| BAB. I     PENDAHULUAN                                                                           | 1              |
| 1.1.   Latar Belakang                                                                            | 1              |
| 1.2.   Landasan Hukum                                                                            | 6              |
| 1.3.   Maksud dan Tujuan Penyusunan                                                              | 8              |
| 1.4.   Sistematika Penulisan                                                                     | 9              |
| BAB. II    HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BENGALON TAHUN LALU                            | 11             |
| 2.1.   Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bengalon 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bengalon | 11             |
| 2.2.   Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengalon                                             | 14             |
| 2.3.   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bengalon                       | 18             |
| BAB. III   TUJUAN   DAN   SASARAN   KECAMATAN   BENGALON                                         | 20             |
| 3.1.   Telahan Terhadap Kebijakan Nasional                                                       | 20             |
| 3.2.   Tujuan dan Sasaran Renja                                                                  | 22             |
| BAB. IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BENGALON                                        | 23             |
| 4.1   Program dan Kegiatan                                                                       | 23             |
| BAB V     PENUTUP                                                                                | 34             |

DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                           | <i>Halaman</i> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 1.1 | Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja                                                                                                       | 4              |
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kutai Timur | 13             |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur                                                                     | 16             |
| Tabel 4.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Bengalon   | 24             |

## DAFTAR ISI

|                                                                       | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                                  | i       |
| DAFTAR ISI.....                                                       | ii      |
| BAB I PENDAHULUAN                                                     |         |
| A. Latar Belakang.....                                                | 1       |
| B. Landasan Hukum .....                                               | 4       |
| C. Maksud dan Tujuan .....                                            | 6       |
| D. Struktur Organisasi .....                                          | 9       |
| E. Sistematika Penulisan.....                                         | 29      |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BENGALON TAHUN SEBELUMNYA |         |
| A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya .....              | 30      |
| B. Analisis kinerja pelayanan OPD.....                                | 31      |
| C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....         | 34      |
| D. Review Terhadap OPD .....                                          | 35      |
| E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....            | 36      |
| BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN                                  |         |
| A. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Bengalon .....                  | 37      |
| B. Program Dan Kegiatan.....                                          | 37      |
| BAB IV PENUTUP .....                                                  | 38      |

## KATA PENGANTAR

Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengalon Tahun 2024 ini dapat selesai pada waktunya. Kecamatan Bengalon mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung kinerja pembangunan Kabupaten Kutai Timur lebih optimal. Berdasarkan peranan tersebut maka dokumen RENJA ini memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan kinerja Kecamatan Bengalon.

Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita banggakan ini. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terimakasih.

Camat,



**Drs. SUHARMAN**  
NIP. 19660601 200012 1 002





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Bengalon secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana (Kerja Renja) Kecamatan Bengalon membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kecamatan Bengalon disusun dengan tahapan :



**1. Persiapan Penyusunan**

Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

**2. Penyusunan Rancangan Awal**

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

**3. Penyusunan Rancangan**

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

**4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

**5. Perumusan Rancangan Akhir** Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

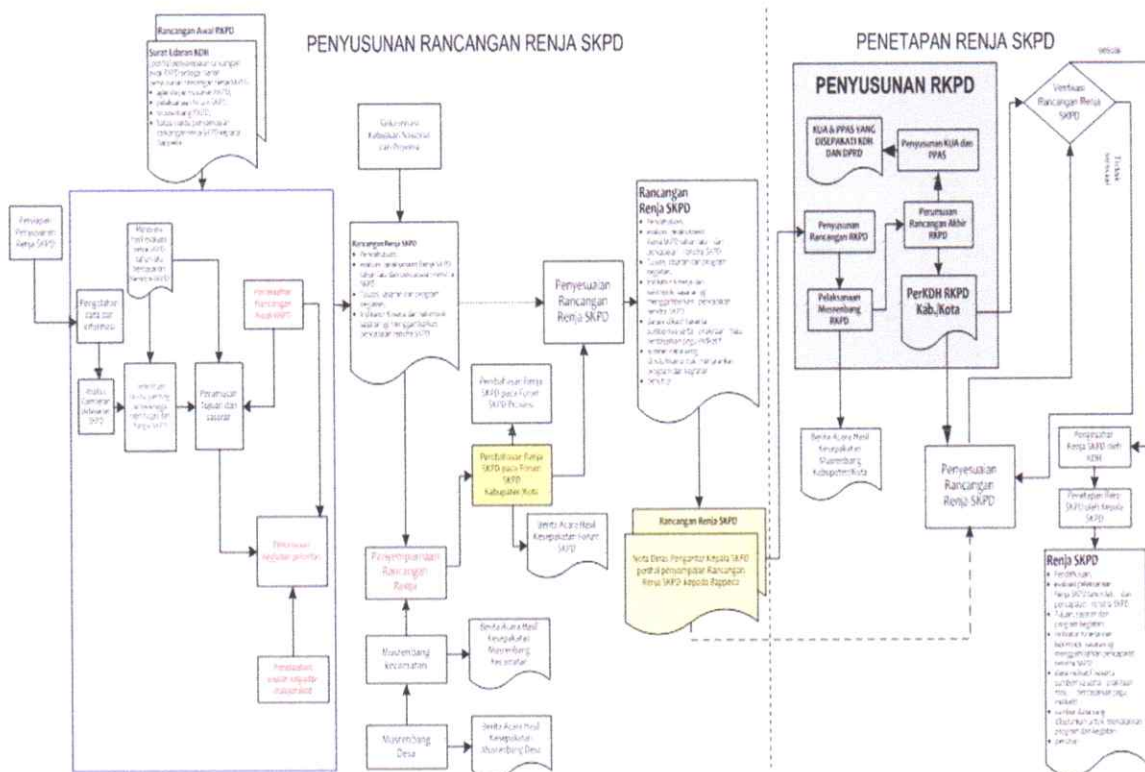
Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Bengalon Tahun 2023 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Bengalon yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra PD.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan. Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja.

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja PD disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Kutai Timur untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

**Tabel 1.1.**  
**Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja**



Kecamatan Bengalon adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Timur, terbagi dalam 11 desa dan 4 desa persiapan. Kecamatan Bengalon mempunyai luas wilayah  $\pm 135.856,74$  ha .

Rencana kerja OPD Kecamatan Bengalon Tahun 2024 , merupakan rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu :

***“Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”***



Visi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur selanjutnya diterjemahkan dalam rumusan misi. Misi menunjukkan *the reason for being* Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan Kutai Timur sejahtera untuk semua. Misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasil Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi.
3. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Peraturan tentang Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditegaskan kembali dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Adapun tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bengalon adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
10. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kedudukan di wilayah kecamatan;

11. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan; dan
12. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan**

#### **1. Maksud Penyusunan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bengalon Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana kerja Kecamatan Bengalon jangka pendek 1(satu) tahun untuk tahun 2024.
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Bengalon dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas Kecamatan Bengalon dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis perangkat daerah;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Bengalon dalam jangka 1 tahun;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Kecamatan Bengalon;
6. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.



## **2. Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bengalon tahun 2024 adalah untuk menyerasikan antara Renja dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dengan melakukan intervensi strategis bagi pelaksanaan pembangunan, melalui upaya pengembangan terintegrasi-terkoordinasi bidang-bidang yang strategik. Secara lebih eksplisit tujuan penyusunan Renja Kecamatan Bengalon Tahun 2024 adalah :

1. Menyinkronkan program dan kegiatan Kecamatan Bengalon Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan
2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam peningkatan kinerja Kecamatan Bengalon
3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya serta sumber daya manusia.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari Rencana Kerja OPD Kecamatan Bengalon Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut;

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **Bab II Evaluasi Renja Kecamatan Bengalon Tahun lalu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bengalon Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bengalon

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengalon
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

### **Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bengalon**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bengalon

### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Program dan Kegiatan**

### **Bab V Penutup**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BENGALON TAHUN**  
**2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bengalon Tahun Sebelumnya**  
**Capaian Renstra Kecamatan Bengalon**

Kecamatan Bengalon adalah salah satu OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan, fungsi penunjang bidang pemerintahan dengan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar **Rp. 9.467.571.503** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.397.221.296** atau **98.75 %**.

Indikator programnya adalah : Penyelenggaraan penyediaan administrasi perkantoran dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran. Indikator output kegiatannya adalah penyelenggaraan penyediaan administrasi perkantoran, proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 98 %.

- **Keberlanjutan**

Meningkatnya kualitas pengetahuan aparatur dalam mengoperasikan fasilitas teknologi dan mempermudah akses informasi serta publikasi data terkait kegiatan kecamatan, anggaran dan informasi lainnya. Ada koordinasi antara kecamatan dan desa dalam hal pelayanan tertib administrasi.

- **Hambatan**

Kurangnya sarana dan prasarana teknologi serta ketersediaan SDM yang mengakibatkan overload pekerjaan masing masing staf.

- **Pendorong**

Tingginya rasa tanggung jawab aparatur dan deatline penyelesaian tugas atau pekerjaan sesuai ketentuan waktu.

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Secara umum, pencapaian kinerja Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur per 31 Desember 2023 telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari anggaran sebesar Rp. 7.328.916.771 yang masih berjalan pada tahun anggaran 2023.

**TABEL 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022-2023**  
**Kabupaten Kutai Timur**

| Kecamatan Bengalon |                                                                |                                                          |                                                    |                                                                                |                                                                 |                 |                       |                                                             |                                                                            |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kode               | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENCST RA 2021-2026 | Realisasi i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan S/D Tahun 2022 | Target Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |                 |                       | Target Program / Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 |                     |
|                    |                                                                |                                                          |                                                    |                                                                                | Target Renja Perangkat at Daerah                                | Realisasi Renja | Tingkat Realisasi (%) |                                                             | Realisasi Capaian                                                          | Tingkat Capaian (%) |
| 1                  | 2                                                              | 3                                                        | 4                                                  | 5                                                                              | 6                                                               | 7               | (8)=(7/6)             |                                                             | 10=(5+7+9)                                                                 | 11                  |
| 1                  | Program Pelayanan Publik                                       | Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Publik Perkantoran     | Terselaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%                                                                           |                                                                 |                 | 37,07 %               | 98%                                                         | 98%                                                                        | 96%                 |
| 2                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Tersedianya Penunjang Urusan PemerintahanDaerah          | Terselaksanya Penunjang Urusan PemerintahanDaerah  | 100%                                                                           |                                                                 |                 | 51,38%                | 100%                                                        | 98%                                                                        | 99%                 |
| 3                  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa                           | Tersedianya Pemberdayaa n Masyarakat Desa                | Terselaksana nya Pemberdayaan Masyarakat Desa      | 87%                                                                            |                                                                 |                 | 37,57 %               | 87%                                                         | 86%                                                                        | 92%                 |



|   |                                                      |                                                          |                                                            |     |  |  |  |        |     |     |     |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--------|-----|-----|-----|
| 4 | Program Ketentraman dan Ketertiban Umum              | Tersedianya Ketentraman dan Ketertiban Umum              | Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum              | 87% |  |  |  | 12,04% | 85% | 87% | 86% |
| 5 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum            | Tersedianya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum            | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum            | 85% |  |  |  | 28,81% | 85% | 86% | 86% |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah | 86% |  |  |  | 41,70% | 87% | 86% | 86% |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengalon

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur melaksanakan fungsi penunjang daerah di bidang pemerintahan, oleh karena itu Kecamatan Bengalon tidak termasuk dalam OPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan **Indikator Kinerja Utama**.

Kecamatan Bengalon berdasarkan kinerja yang sudah ditentukan terhadap indikator kinerja kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 atau indikator kinerja utama yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja pelayanan di Kecamatan Bengalon dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya prasana daya dukung oprasional kantor
3. Meningkatnya disiplin aparatur
4. Meningkatnya kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur
5. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
7. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan peran serta kepemudaan
8. Meningkatnya peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan
9. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Program kegiatan Kecamatan Bengalon Tahun 2024 masih merupakan penjabaran dari RENSTRA Kecamatan Bengalon Tahun 2016 - 2021. Adapun program kegiatan Kecamatan Bengalon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Program Program yang ada di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur ;

**Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan ukuran waktu tertentu.

**TABEL 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengalon Kabupaten**  
**Kutai Timur**

| No . | IKU                                                                                                                                                   | SPM / Standar Nasiona l | IKK | Target RENSTRA Perangkat Daerah |      |      |      | Realisasi Capaian |      | Proyeksi |      | Catatan Analisa                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                       |                         |     | 2019                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2019              | 2020 | 2021     | 2022 |                                                                                                        |
| 1    | 2                                                                                                                                                     | 3                       | 4   | 5                               | 6    | 7    | 8    | 9                 | 10   | 11       | 12   | 13                                                                                                     |
| 1    | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                            |                         |     | Baik                            | Baik | Baik | Baik | Baik              | Baik | Baik     | Baik | SKM dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB nomor 14 thn 2017 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat |
| 2    | Persentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pem, trantib, kessos, perekonomian ,dan pemb fisik yang di tindak lanjuti dalam satu tahun |                         |     | 90%                             | 92%  | 95%  | 95%  | 85%               | 88%  | 90%      | 90%  |                                                                                                        |
| 3    | Persentase peningkatan desa/keluraha n dengan adm berkualitas baik                                                                                    |                         |     |                                 |      |      |      |                   |      |          |      |                                                                                                        |

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan Uraian Tugas Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur ditetapkan tugas kecamatan adalah : Menyelenggarakan tugas pemerintahan



4. Kapasitas kelembagaan desa belum memadai
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang
6. Enclave lahan di wilayah Kecamatan Bengalon perlu ditingkatkan
7. Banyaknya kasus sengketa lahan

### **2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan**

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Bengalon dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Bengalon adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Bengalon yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Timur;
2. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Bengalon yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Timur;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bengalon.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja dilingkungan Pemerintah Kecamatan Bengalon dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Bengalon, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
2. Masih adanya ego sektoral masing-masing OPD tentang program dan kegiatan;
3. Belum optimalnya perencanaan strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang bersangkutan;



6. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
7. Masih kurangnya pemahaman aparat terhadap pengadaan barang dan jasa (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Bengalon sebagai berikut :

1. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali tidak tuntas;
2. Masih belum optimalnya pelaporan kecamatan tentang program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Masih minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Bengalon sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Bengalon.

Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat Pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;
5. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan (internet dan komputer).

pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang “*menyentuh hati*” dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “*dilayani*” menjadi “*melayani*”.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya dipelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bengalon**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Setiap semua yang akan melakukan sesuatu tentu mempunyai sebuah tujuan. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Bengalon adalah sebagai berikut :

1. Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
2. Menata kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Bengalon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat;
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan;
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan, Aset, Pelayanan Publik dan Pemerintahan Desa Kecamatan Bengalon;
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bengalon;
6. Mewujudkan Administrasi Perkantoran Kecamatan Bengalon yang Transparan.



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN BENGALON**

**4.1. Program dan Kegiatan**

Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur merencanakan 6 Program dan 54 Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 9.408.275.133,. Secara keseluruhan ada 6 (Enam) program yang merupakan program prioritas secara terinci dalam beberapa program dan kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD.
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
  - b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel. 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
Kabupaten Kutai Timur

Kecamatan Bengalon

| Kode |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |                       |                                                                                       | Rencana Tahun 2024                                                               |                                                                                        |                                                     |                |                      |                  |                |
|------|----|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|
|      |    |                                                            | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan                                                                        | Lokasi Output Kegiatan                                                           | Target Capaian Kinerja                                                                 |                                                     |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                  |                |
|      |    |                                                            |                   |                       |                                                                                       |                                                                                  | Program                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                               | Hasil Kegiatan |                      |                  |                |
|      |    | Kantor Camat Bengalon                                      |                   |                       |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                        |                                                     |                |                      | 9.408.275.133,00 |                |
| 7    |    | UNSUR KEWILAYAHAN                                          |                   |                       |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                        |                                                     |                |                      | 9.408.275.133,00 |                |
| 7    | 01 | KECAMATAN                                                  |                   |                       |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                        |                                                     |                |                      | 9.408.275.133,00 |                |
| 7    | 01 | 01                                                         |                   |                       |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                        |                                                     |                |                      | 7.757.797.570,00 |                |
| 7    | 01 | 01                                                         | 2.01              |                       |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                        |                                                     |                |                      | 300.000.000,00   |                |
| 7    | 01 | 01                                                         | 2.01              | 0001                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                  |                                                                                        |                                                     |                |                      |                  |                |
|      |    |                                                            |                   |                       | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kecamatan Bengalon    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Bengalon | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95 %           | 2 Dokumen            | 100 %            | 200.000.000,00 |
| 7    | 01 | 01                                                         | 2.01              | 0002                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                                  |                                                                                        |                                                     |                |                      |                  |                |
|      |    |                                                            |                   |                       | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kecamatan Bengalon    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Bengalon | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95 %           | 2 Dokumen            | 100 %            | 50.000.000,00  |
| 7    | 01 | 01                                                         | 2.01              | 0006                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                  |                                                                                        |                                                     |                |                      |                  |                |



|   |    |    |      |      |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                     |      |                   |       |                  |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------|-------|------------------|
|   |    |    |      |      | Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor dan Laporan Keuangan Kecamatan Bengalon   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Bengalon | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95 % | 1 Laporan         | 100 % | 50.000.000,00    |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                     |      |                   |       | 6.342.797.570,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                     |      |                   |       |                  |
|   |    |    |      |      | Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor dan Laporan Keuangan Kecamatan Bengalon   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon                | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95 % | 33/12 Orang/bulan | 100 % | 5.069.993.203,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                     |      |                   |       |                  |
|   |    |    |      |      | Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor dan Laporan Keuangan Kecamatan Bengalon   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon                | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95 % | 12 Dokumen        | 100 % | 922.804.367,00   |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                     |      |                   |       |                  |
|   |    |    |      |      | Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor dan Laporan Keuangan Kecamatan Bengalon   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon                | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95 % | 1 Dokumen         | 100 % | 200.000.000,00   |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                     |      |                   |       |                  |
|   |    |    |      |      | Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor dan Laporan Keuangan Kecamatan Bengalon   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon                | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95 % | 12 Laporan        | 100 % | 150.000.000,00   |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                     |      |                   |       | 40.000.000,00    |

|   |    |    |      |      |                                                                                    |                                                                                        |                                                                            |                                                     |      |               |                |                |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                  |                                                                                        |                                                                            |                                                     |      |               |                |                |
|   |    |    |      |      | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kecamatan Bengalon | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | -                                                                          | -                                                   |      | 40.000.000,00 |                |                |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                          |                                                                                        |                                                                            |                                                     |      |               | 325.000.000,00 |                |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                             |                                                                                        |                                                                            |                                                     |      |               |                |                |
|   |    |    |      |      | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kecamatan Bengalon | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95 % | 6 Paket       | 100 %          | 150.000.000,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                                                                                        |                                                                            |                                                     |      |               |                |                |
|   |    |    |      |      | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kecamatan Bengalon | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95 % | 15 Orang      | 100 %          | 175.000.000,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 |                                                                                        |                                                                            |                                                     |      |               | 220.000.000,00 |                |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                  |                                                                                        |                                                                            |                                                     |      |               |                |                |
|   |    |    |      |      | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kecamatan Bengalon | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon        | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95 % | 1 Paket       | 100 %          | 20.000.000,00  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                          |                                                                                        |                                                                            |                                                     |      |               |                |                |
|   |    |    |      |      | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kecamatan Bengalon | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon        | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95 % | 1 Laporan     | 100 %          | 50.000.000,00  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                                                                                        |                                                                            |                                                     |      |               |                |                |
|   |    |    |      |      | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon        | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95 % | 1 Laporan     | 100 %          | 150.000.000,00 |







|   |    |    |      |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                     |      |                           |         |                |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------|---------|----------------|
|   |    |    |      |      | Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Bengalon                                                                    | Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                   | Terlaksananya Pemberdayaan Desa Kecamatan Bengalon | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92 % | 1 Lembaga Kemasyar akatan | 11 Desa | 150.000.000,00 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                     |      |                           |         |                |
|   |    |    |      |      | Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Bengalon                                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                               | Terlaksananya Pemberdayaan Desa Kecamatan Bengalon | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92 % | 2 Laporan                 | 11 Desa | 180.000.000,00 |
| 7 | 01 | 03 | 2.06 |      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                     |      |                           |         | 100.000.000,00 |
| 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                     |      |                           |         |                |
|   |    |    |      |      | Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Bengalon                                                              | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | -                                                  | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90%  | 12 Keluarga               | -       | 100.000.000,00 |
| 7 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                     |      |                           |         | 120.000.000,00 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertertiban Umum                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                     |      |                           |         | 120.000.000,00 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                     |      |                           |         |                |



|   |    |    |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                     |    |          |         |                |                |
|---|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----------|---------|----------------|----------------|
|   |    |    |      | -                                                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Hermonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                           | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | -  | 1        | Laporan | -              | 120.000.000,00 |
| 7 | 01 | 05 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                     |    |          |         |                | 524.977.563,00 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasan Kepala Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                     |    |          |         |                | 524.977.563,00 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0001                                                                    | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                     |    |          |         |                |                |
|   |    |    |      |                                                                         | Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Bengkulu                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah Kecamatan Bengkulu | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22 | 50 Orang | 3       | 200.000.000,00 |                |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0004                                                                    | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                     |    |          |         |                |                |
|   |    |    |      |                                                                         | Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Bengkulu                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 | Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah Kecamatan Bengkulu | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22 | 15 Orang | 3       | 124.977.563,00 |                |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0006                                                                    | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                     |    |          |         |                |                |

|   |    |    |      |                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                     |      |                         |            |                |                |
|---|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|----------------|----------------|
|   |    |    |      | Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Bengkulu                            | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila         | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengutusan Kepala Daerah Kecamatan Bengkulu | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22   | 1 Lembaga Masyarakat at | 3          | 200.000.000,00 |                |
| 7 | 01 | 06 |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                             |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                     |      |                         |            |                | 355.500.000,00 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa              |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                     |      |                         |            |                | 355.500.000,00 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0001                                                                                           | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                      |                                                                                                               |                                                     |      |                         |            |                |                |
|   |    |    |      | Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Bengkulu | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Bengkulu    | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92 % | 1 Dokumen               | 5 kegiatan | 45.000.000,00  |                |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0003                                                                                           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                    |                                                                                                               |                                                     |      |                         |            |                |                |
|   |    |    |      | Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Bengkulu | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Bengkulu    | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92 % | 4 Dokumen               | 5 kegiatan | 120.000.000,00 |                |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0004                                                                                           | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                                     |                                                                                                               |                                                     |      |                         |            |                |                |
|   |    |    |      | Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Bengkulu | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Bengkulu    | - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92 % | 1 Laporan               | 5 kegiatan | 20.000.000,00  |                |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0005                                                                                           | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                         |                                                                                                               |                                                     |      |                         |            |                |                |

|       |    |    |      |                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                              |      |              |               |                  |
|-------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|------------------|
|       |    |    |      | Cakupan Fasilitas<br>Pembinaan,<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa dan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Bengalon | Jumlah Dokumen<br>Fasilitas dalam rangka<br>Pelaksanaan Tugas Kepala<br>Desa dan Perangkat Desa | Jumlah<br>Fasilitas, Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa Kecamatan Bengalon | - Kab. Kutai<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 92 % | 1<br>Dokumen | 5<br>kegiatan | 50.000.000,00    |
| 7     | 01 | 06 | 2.01 | 0009                                                                                                            | Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                   |                                                                                                                        |                                                              |      |              |               |                  |
|       |    |    |      | Cakupan Fasilitas<br>Pembinaan,<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa dan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Bengalon | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan<br>Desa  | Jumlah<br>Fasilitas, Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa Kecamatan Bengalon | - Kab. Kutai<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 92 % | 1<br>Dokumen | 5<br>kegiatan | 20.000.000,00    |
| 7     | 01 | 06 | 2.01 | 0017                                                                                                            | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                      |                                                                                                                        |                                                              |      |              |               |                  |
|       |    |    |      | Cakupan Fasilitas<br>Pembinaan,<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa dan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Bengalon | Jumlah Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Pendampingan Desa di<br>Wilayahnya                        | Jumlah<br>Fasilitas, Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan<br>Desa Kecamatan Bengalon | - Kab. Kutai<br>Timur, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 92 % | 1<br>Laporan | 5<br>kegiatan | 100.500.000,00   |
| TOTAL |    |    |      |                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                              |      |              |               | 9.408.275.133,00 |



Dana indikatif Rencana Kerja (Renja) didasarkan dengan Program dan Kegiatan yang sudah disesuaikan dengan pemuatahiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuatahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Setiap Program dan Kegiatan mempunyai indikator kinerja masing-masing seperti berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikatornya : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan, capaian target kinerja adalah 100%.

a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu. Jumlah dokumen yang disusun dengan target kinerja yaitu Renja, Renja-P, Review Renstra, Evaluasi Renja, PK, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA.

b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum. Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN serta terlaksananya penatausahaan keuangan berupa laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan keuangan tahunan, laporan keuangan bulanan dan laporan hasil rekonsiliasi keuangan.

c. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah. Terpenuhi Pencatatan aset daerah uang dikelola oleh SKPD

d. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian. Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian, Jumlah Administrasi Kepegawaian, dikelola Administrasi Kepegawaian, Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis, sosialisasi dan diklat perundang-undangan.
- e. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum, jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, fasilitasi tamu, rapat dan koordinasi SKPD.
- f. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan, jumlah unit pengadaan meubeler dan sarana dan prasarana kantor.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator Persentase terlaksananya kegiatan jasa sebagai penunjang urusan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan, jumlah kendaraan roda 4 (empat) dan Roda 2 Dua) dinas/operasional yang dipelihara, dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**  
Indikatornya : Jumlah penyelenggaraan pelayanan public, capaian target kinerja adalah 100 %  
a. Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan  
Indikator : Tersedianya layanan kepada masyarakat (pelayanan terpadu )  
b. Kegiatan : Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
Indikator : Terlaksananya Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**  
Indikatornya : Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan, capaian target kinerja adalah 100 %.  
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Indikator : Terlaksananya Koordinasi dengan Desa
4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**  
Indikatornya : Jumlah Pelanggaran Perda / Perkada, Capaian Target kinerja 100%  
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Indikator : Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**  
Indikatornya : Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, target capaian kinerja 100 %.  
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Indikator : Presentase terselenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Desa

6. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- Indikatornya : Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, Capaian Target Kinerja 100 %.
- Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Indikator : Persentase Desa yang difasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan

## BAB V

### PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengalon Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Timur *“Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”* dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Bengalon. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Bengalon di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Bengalon berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengalon Tahun 2023 serta diselaraskan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten awal Kutai Timur Tahun 2023.
  - b. Kecamatan Bengalon berkewajiban untuk menyusun Ranwal Renja Kecamatan Bengalon Tahun 2023 dengan berpedoman pada Ranwal RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.
  - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Bengalon Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Camat dan penyelenggara pemerintah kecamatan Bengalon perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai



Sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sangat tergantung pada mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Bengalon, 2024  
Camat,  
  
**Drs. SUHARMAN**  
NIP. 19660601 200012 1 002